



Buletin Parlementaria

Antisipasi Banjir Kala Bulan Ramadan



7 Jalan Tambang
Semestinya
Tak Gunakan
Jalan Milik
Negara



13 Stok BBM
Jelang
Ramadan
dan Idul Fitri
Harus Aman

Nomor 1285/III/III/2024 • Maret 2024



9 772614 339005



Antisipasi Banjir Kala Bulan Ramadan

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmennya untuk mendorong penanganan banjir Kali Sabi melalui penganggaran yang efektif dan kerja sama antar pemerintah daerah dan pusat. Ia mengungkapkan bahwa solusi jangka pendek dan panjang harus diintegrasikan dengan pendekatan sosial untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi.

"Yang jadi persoalan adalah tingkat aspek sosial lapangan harus diselesaikan dulu, kami harapkan kerja sama pemerintah kabupaten dan provinsi, serta Kementerian PUPR untuk menangani aspek-aspek sosial yang pada akhirnya kami harapkan anggaran yang turun jadi

tidak terbengkalai," kata Ridwan pada **Parlementaria** dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V bersama Kementerian PUPR di Tangerang, Banten, Jumat (15/3).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun menyoroti beberapa tantangan di lapangan, apalagi selama bulan Ramadan ini, seperti akses yang sulit ke Kali Sabi, pertumbuhan rumah-rumah liar, dan masalah sampah yang bertaburan dari rumah tangga. "Bahkan di sini, kalau kami dengar dari masyarakat bahwa masih banyak juga perusahaan-perusahaan swasta dan lainnya," lanjutnya.

Dalam strategi jangka pendek, pemerintah fokus pada normalisasi dan pemeliharaan sungai untuk mengurangi dampak langsung banjir. Sedangkan untuk jangka

panjang, rencana komprehensif yang melibatkan pembangunan polder dan peningkatan infrastruktur sungai sedang dipersiapkan.

Dijelaskan dengan penjelasan teknis oleh Dirjen Bina Teknik Sumber Daya Air Kementerian PUPR Muhammad Rizal menambahkan, "Kalau langkah teknis untuk jangka pendek, kami bisa bekerja di palung sungainya. Ya seperti yang terjadi bisa dengan normalisasi kemudian kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai. Jangka panjangnya tadi sudah dipaparkan bahwa kami ke depan butuh polder-polder nanti dengan pompanya terus kemudian juga untuk lintasan dari Kali Sabi yang melintasi saluran irigasi itu kami tambah lagi itu (polder dan pompa)," sebutnya. — **mun/aha**



FOTO: MUNICHEN/NR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae meninjau Kali Sabi di Tangerang, Banten, Jumat (15/3/2024).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen



FOTO: IST/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024 di Prancis.

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau *Women Speakers' Summit 2024* yang diselenggarakan di Prancis. Ia juga menyinggung mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu.

"Tahun 2024 merupakan tahun demokrasi di mana lebih dari 70 negara melaksanakan pemilihan umum (Pemilu). Sekitar 50 % penduduk dunia menggunakan hak pilihnya untuk memilih para pejabat publik," ungkap Puan, Jumat (8/3).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menekankan Pemilu dapat menjadi penentu masa

depan demokrasi diberbagai negara. Puan pun meyakini, kepemimpinan perempuan di bidang politik dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi.

"Hal ini karena keterwakilan perempuan yang lebih besar akan menjadikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Suara berbagai elemen masyarakat akan lebih jelas terdengar. Dan kepentingan masyarakat akan lebih terwakili pada berbagai institusi publik," jelasnya.

Menurut Puan, keterwakilan perempuan di parlemen dapat memperkuat kualitas demokrasi. Hadirnya anggota perempuan dinilai dapat menjadikan parlemen lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat.

gal/aha



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danurtito, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivari, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbari, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firata Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Stimpout, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Frederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Sihahan, S.I.P. Eki Baehaki, S.Sos. M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Perolehan Kursi Harusnya Cukup Ditentukan Suara Terbanyak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menanggapi tentang Putusan MK yang menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional bersifat inkonstitusional. Menurutnya, besaran ambang batas parlemen tidak perlu diperdebatkan.

Sebab, jika penentuan seorang caleg dapat kursi atau tidak masih didasarkan pada ambang batas parlemen, berapapun angkanya, maka akan tetap ada suara rakyat yang sia-sia. Karena itu, penentuan perolehan kursi harusnya cukup ditentukan siapa caleg yang

memperoleh suara terbanyak sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di Dapil tersebut.

"Jadi ambang batas atau tidak ada, saya kira tidak besar pengaruhnya. Justru kalau ada ambang batas, misalnya 4 atau 5 persen, kalau ada partai sudah memperoleh kursi misalnya 3,8 persen suara itu menjadi sia-sia karena rakyat yang memilih. Berapa juta (suara yang terbuang) kalau untuk mendapat 3,8 persen ambang batas itu dia tidak bisa masuk karena syaratnya 4 persen," ujar Syamsurizal di Yogyakarta, Rabu (6/4).

Meskipun demikian, ia belum sampai pada kesimpulan untuk

mendukung atau menolak Putusan MK tersebut. Karena yang paling substansial adalah tiap caleg harus mendapatkan suara setinggi-tingginya untuk meraih alokasi kursi yang tersedia.

"Katakanlah di Dapil A mereka membutuhkan 7 kursi, siapa yang bisa berebut jumlah kursi itu, siapa yang tertinggi, mereka yang bisa mengisi itu. Jadi, kalau memang mereka partai bisa melewati ambang batas, tapi *toh* dia kalah jumlah suara dengan kursinya dan kursi yang tujuh sudah terpenuhi, maka tetap tidak akan ada gunanya. Jadi turunkan saja atau bagaimana *toh* (ambang batas parlemen) tidak begitu besar manfaatnya," jelas Politisi Fraksi PPP ini.

Diketahui, MK beralasan memutuskan hal tersebut selain karena ditentukan tanpa dasar yang jelas, besaran ambang batas tersebut terbukti membuat pemilu yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem proporsional justru menjadi tidak proporsional. Tidak sedikit suara rakyat yang terbuang karena partai politik dan calon wakil rakyat yang mereka dukung gagal masuk parlemen lantaran terbentur ambang batas 4 persen suara sah nasional.

Karena itu, MK memerintahkan agar pembentuk undang-undang merevisi ketentuan ambang batas parlemen 4 persen tersebut untuk diberlakukan pada Pemilu 2029. Ambang batas parlemen 4 persen dari suara sah nasional masih bisa diberlakukan untuk Pemilu 2024 ini.



FOTO: RDN/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat diwawancarai *Parlementaria* di Yogyakarta, Rabu (6/4/2024).

rdn



SKP Belum Efektif Gambarkan Kinerja ASN

Anggota Komisi II DPR RI Haeny Relawati R. W. mengkritik sistem penilaian ASN menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dinilai masih belum efektif menggambarkan dengan akurat kontribusi seorang ASN terhadap kinerja instansi.

berbasis capaian anggaran, tanpa mempertimbangkan kualitas atau dampak nyata dari pekerjaan yang dilakukan oleh ASN.

"Hal-hal yang masih menitikberatkan kuantitatif ini harus kita benahi bersama dan itu harus diperinci oleh masing-masing institusi yang berwenang. Saya sangat

mengharapkan kita menekankan pada *mental achievement* dan kualitas kinerja dari ASN itu sendiri," imbuhnya.

Diharapkan dengan adanya dorongan ini, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem penilaian ASN, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil. — uf/aha

”

HAL-HAL YANG MASIH MENITIKBERATKAN KUANTITATIF INI HARUS KITA BENAHI BERSAMA DAN ITU HARUS DIPERINCI OLEH MASING-MASING INSTITUSI YANG BERWENANG. SAYA SANGAT MENGHARAPKAN KITA MENEKANKAN PADA *MENTAL ACHIEVEMENT* DAN KUALITAS KINERJA DARI ASN ITU SENDIRI.

"Menurut saya ada hal yang harus diperbaiki menyangkut analisa-analisa kuantitatif dan kualitatif standar penilaian. Karena mohon maaf, sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai-nilai tersebut diisi sendiri oleh ASN yang bersangkutan," ujar Haeny usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/3).

Selain itu, Anggota Legislatif Dapil Jatim IX tersebut juga menganggap bahwa SKP masih terlalu terfokus pada aspek kuantitatif, terutama



FOTO: LIBID/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi II DPR RI, Haeny Relawati R. W. saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/3/2024).

Ada Dugaan Kecurangan Seleksi CASN di Palembang

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Regional VII BKN Palembang, Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya menyerahkan berkas aduan-aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan selama proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023. Wahyu dengan tegas mengatakan proses seleksi penerimaan CASN harus segera diperbaiki dan oknum yang terbukti terlibat harus ditindak.

"Nah, itulah saya tadi menyatakan, prosesnya harus ada perbaikan. Dan apa yang selama ini salah harus segera diperbaiki. Kalau kemarin ada oknum-oknum yang bermain itu juga harus segera ditindak. Tidak boleh dikasih aman," kata Wahyu usai kunjungan kerja spesifik di Palembang, Rabu (6/3).

Disampaikan Legislator Dapil Sumatera Selatan II ini, dokumen yang diserahkan kepada Kepala Kanreg VII BKN Palembang Margi Prayitno merupakan dokumen ataupun aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang diduga mengalami kecurangan selama proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023 di Palembang.

”

KALAU KEMARIN ADA OKNUM-OKNUM YANG BERMAIN ITU JUGA HARUS SEGERA DITINDAK. TIDAK BOLEH DIKASIH AMAN.

"Dokumen orang-orang yang terzalimi itu. Orang sudah lulus, dibilang tidak lulus. Terakhir kali, karena terakhir kali sudah habis alasan, mereka dipaksa mengundurkan diri. Bahkan setelah mereka tidak mau mengundurkan diri, surat pengunduran diri mereka pun dipalsukan. Luar biasa sekali, ada sekitar 24 orang itu," tegasnya.

Menurut Wahyu, proses seleksi haruslah dilakukan dengan ketat, profesional dan transparan. Sehingga proses seleksi yang terjadi menciptakan keadilan bagi semua peserta. Dan negara, lanjutnya, tidak boleh memberikan ruang kepada ketidakadilan apalagi membiarkan ada oknum-oknum yang mengambil celah dalam proses seleksi. [we/aha](#)



FOTO: WE/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya saat menyerahkan berkas aduan-aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan selama proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023 Kantor Regional VII BKN Palembang.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Jalan Tambang Semestinya Tak Gunakan Jalan Milik Negara

Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang rusak parah menjadi sorotan akibat banyak truk tambang melintas. Warga pun tak tinggal diam melalui Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan mengadakan kondisi jalan yang menjadi akses warga melintas tersebut kepada Komisi III DPR RI selaku Komisi yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan.

Merespon hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat diwawancarai *Parlementaria* dan awak media di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3) menyayangkan terjadinya penyalahgunaan jalan tambang yang semestinya tidak menggunakan jalan negara sebagaimana telah diatur dalam



Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat diwawancarai *Parlementaria* dan awak media di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

”

KALAU TERKAIT DENGAN PERSOALAN TAMBANG PENGGUNAAN JALAN MESTINYA JALAN TAMBANG ITU SUDAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERBA. DAN PADA PASAL 91 BAIK AYAT 1 NYA MAUPUN AYAT 2-NYA KAN JELAS DISEBUTKAN BAHWA KALAU PELAKU TAMBANG MESTINYA MEMBUAT JALAN TAMBANG SENDIRI TIDAK MENGGUNAKAN JALAN YANG DIMILIKI OLEH NEGARA.

Undang-Undang (UU) Minerba Pasal 91 Ayat 1 maupun Ayat 2.

"Kalau terkait dengan persoalan tambang penggunaan jalan mestinya jalan tambang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Minerba. Dan pada Pasal 91 baik ayat 1 nya maupun Ayat 2-nya kan jelas disebutkan bahwa kalau pelaku

tambang mestinya membuat jalan tambang sendiri tidak menggunakan jalan yang dimiliki oleh negara," ujar Supriansa usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum.

Oleh karena itu, wajar bilamana masyarakat yang diwakili Gerakan Masyarakat Parung Panjang itu datang ke rumah rakyat dalam hal ini

khususnya Komisi III DPR RI untuk meminta perlindungan. Melalui audiensi tersebut, tuturnya, dapat semakin memberikan gambaran kepada Komisi III DPR RI bahwa kondisi masyarakat di Parung Panjang sangat terganggu dengan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi tambang disana.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan Saeful Anwar mengeluhkan beroperasinya truk tambang di Parung Panjang yang melintas hingga 24 jam setiap hari hingga menimbulkan permasalahan. Belum lagi, ditambah banyaknya permasalahan antara lain seperti supir-supir truk tronton yang masih dibawah umur hingga dugaan terjadinya pungli di jalur perbatasan. **pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ubah Kesan Seram Gedung SPKT Jambi jadi Humanis

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi bentuk bangunan Gedung SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jambi. Ia menilai, Polda Jambi berhasil menyulap kesan menegangkan di lingkungan kepolisian menjadi lebih humanis.

”

RUANG SATU DAN LAINNYA SUASANYA BERBEDA, SESUAI PERUNTUKANNYA. TERASA LEBIH HUMANIS, LEBIH NYAMAN DENGAN TAGLINE ATAU TUJUAN YANG DICANTUMKAN OLEH BAPAK KAPOLDA JAMBI YAKNI "NGEWONGKE UWONG" JADI BAGAIMANA MENGHARGAI MASYARAKAT YANG DATANG KE SINI.

"Gedung SPKT ini mungkin satu-satunya gedung yang dekat kenyamanan kepada masyarakat. Seperti apa yg kita lihat, ini mungkin jadi *role model* untuk polda-polda lainnya," ungkap Pangeran pada Konferensi Pers Kunker Reses Komisi III di Polda Jambi, Sabtu, (2/3).

Memang berbeda dengan kunjungan biasanya, kunker reses kali ini diawali oleh tinjauan ke Gedung SPKT Baru di Polda Jambi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Pangeran, Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana juga mengapresiasi konsep bangunan tersebut.

"Ruang satu dan lainnya suasananya berbeda, sesuai peruntukannya. Terasa lebih humanis, lebih nyaman dengan *tagline* atau tujuan yang dicantumkan oleh Bapak Kapolda Jambi yakni "ngewongke uwong" jadi bagaimana menghargai masyarakat yang datang ke sini," jelas Eva.

Kapolda Jatim Irjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan bahwa bangunan ini di-setting sedemikian rupa agar masyarakat yang datang dan mengadu ke kantor kepolisian bisa lebih nyaman dan rileks.

— syn/aha



FOTO: SHN/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Kunker Reses Komisi III di Polda Jambi, Sabtu, (2/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR: Frasa “Barangsiapa” di KUHP Terbaru Berlaku untuk Setiap Orang

DPR RI memberikan keterangan di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Sidang Pleno Lanjutan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil KUHP untuk Pasal 330 Ayat 1 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 terkait dengan frasa 'Barangsiapa' dalam delik pencabutan atau penarikan kuasa terhadap anak atau pengawasan terhadap anak yang dilakukan oleh salah satu dari orangtua dari anak tersebut.

Pada sidang yang digelar pada Rabu (6/3) di Gedung MK, Jakarta itu, pemohon mendalilkan bahwa ketika mereka membuat laporan terhadap kasus tersebut terhadap aparat penegak hukum, pihak kepolisian memberikan tafsir terhadap Pasal 330 Ayat 1 bahwa itu hanya berlaku untuk Ibu dari anak tersebut saja, sementara pemohon menganggap bahwa semestinya frasa 'barangsiapa' itu berlaku untuk semuanya baik itu Ayah maupun Ibu.

Taufik Basari selaku Tim Kuasa Hukum DPR RI kemudian menerangkan bahwa masih terjadi permasalahan terhadap KUHP lama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1946. Oleh karena itulah, melalui KUHP nasional yang baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 yang nantinya akan berlaku Januari 2026, akan diperbaiki beberapa kekurangan yang dimiliki oleh KUHP saat ini. Salah satunya, dengan memberikan penjelasan dan kepastian (*lex certa* dan *lex stricta*) terhadap delik-delik pidana yang ada.

“Termasuk juga memperbaiki

bahasa baku dari penerjemahan yang awalnya dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia dan menggunakan terminologi hukum yang standar. Nah

”

TERMASUK JUGA MEMPERBAIKI BAHASA BAKU DARI PENERJEMAHAN YANG AWALNYA DARI BAHASA BELANDA KE BAHASA INDONESIA DAN MENGGUNAKAN TERMINOLOGI HUKUM YANG STANDAR.

khusus untuk istilah 'barangsiapa' yang sebenarnya merujuk pada bahasa Belanda yaitu 'hij die' kita sudah melakukan perbaikan di dalam KUHP nasional dengan menerjemahkan 'hij die' itu sebagai 'setiap orang,' jelas Tobas, sapaan akrabnya mengungkapkan.

Artinya, urai Tobas, DPR RI sebenarnya sudah sejak lama memiliki inisiasi seperti apa yang diinginkan oleh para pemohon bahwa frasa 'barangsiapa' itu harusnya ditafsirkan berlaku untuk siapapun baik ayah maupun ibu dan sebagainya. sebagaimana telah tertuang dalam KUHP nasional yang baru diperbaiki dengan kata 'setiap orang' yang seharusnya itu berlaku 'setiap orang' ➡ pun/aha



Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat memberikan keterangan di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Sidang Pleno Lanjutan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Masyarakat Tak Perlu Panik Terhadap Kenaikan Harga Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyampaikan agar masyarakat tidak perlu panik atas kenaikan dan ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan. Bersama dengan Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Komisi IV DPR RI, Dwita melakukan peninjauan langsung ke Pasar Way Halim, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Kamis (7/3).

"Saya rasa dengan kenaikan harga beras menjelang Ramadhan ini, masyarakat tidak perlu panik, karena (stoknya) tersedia. Jadi tidak hanya di operasi pasar, tapi di pasar-pasar tradisional. Itu memang sudah disiapkan tempat untuk menjual beras dengan harga pemerintah,"

tutur Dwita di sela diskusi dengan pemangku kebijakan terkait.

Dwita bersama anggota lain dari Komisi IV DPR RI menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga dan pedagang terkait dengan harga dan ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya. Untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), ada dua hal yang dipantau yaitu ketersediaan dan kepatuhan penjual pada harga eceran tertinggi.

"Kami dari Komisi IV mengunjungi pasar-pasar dalam rangka memantau harga sembako ini termasuk beras telur minyak gula. Tadi kami ke Pasar Way Halim di Bandar Lampung dan kita lihat di sana gerai-gerai yang bekerjasama dengan Bulog itu punya stok untuk menjual beras

dengan harga yang diberikan oleh pemerintah Rp53.400 untuk beras SPHP," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Beras program SPHP merupakan beras yang digulirkan pemerintah melalui penunjukan Perum Bulog. Penyaluran beras SPHP dilakukan dalam bentuk kemasan 5kg dengan harga tertinggi sesuai dengan ketentuan antara lain; Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi seharga Rp10.900 per kg; Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan, sebesar Rp11.500 per kg; serta Zona 3 meliputi Maluku dan Papua senilai Rp11.800 per kg. [uc/aha](#)



FOTO: LUCA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi saat meninjau ketersediaan pangan jelang Ramadan di Pasar Way Halim, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Kamis (7/3/2024).

Pemerintah Diminta Upayakan Penyerapan Beras Dalam Negeri

Kelangkaan beras yang terjadi beberapa waktu ini membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan impor.

Pasalnya, harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi itu, Anggota komisi IV DPR RI Hermanto meminta pemerintah untuk betul betul mempertimbangkan opsi

impor sebagai alternatif akhir dan mengupayakan penyerapan beras dalam negeri. Sebab menurutnya, dirinya melihat situasinya ada kecenderungan yang sebenarnya

”

HARUS DIKAJI TERLEBIH DAHULU SUPAYA BENAR-BENAR KEBIJAKAN INI MENGUNTUNGKAN TERUTAMA PARA NELAYAN-NELAYAN KECIL YANG ADA DI PESISIR-PESISIR ITU.

bisa ditangani selain dengan impor beras.

"Pemerintah jauh hari itu harus sudah mempersiapkan bagaimana desain pertanian kita ini bisa memenuhi kebutuhan mendasar dari bangsa Indonesia yang jumlahnya itu adalah 275 juta jiwa," ungkap Hermanto ketika ditemui tim **Parlementaria** di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Ia pun meminta agar Bulog tidak menjadikan impor sebagai satu satunya solusi di setiap upayanya menjaga stok beras, melainkan perlu mengusahakan membeli beras petani.

"Jangan melulu info sebentar-sebentar impor, sebentar impor, ini adalah langkah yang tidak baik dan kita terus-menerus akhirnya tergantung kepada luar negeri. Saya minta supaya kita harus membeli beras petani supaya petani itu juga kapan lagi dia mau sejahtera," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, untuk menghindari kelangkaan beras di pasar ke depannya, pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola beras di Indonesia. Ia pun mewanti wanti agar jangan sampai petani yang diminta kerja keras ke sawah dan memanen namun pada akhirnya mereka tidak mendapat hasilnya.

"Petani kita sekarang ini sedang mengharap sekali apa yang menjadi kebutuhan mereka terhadap serapan beras yang ada di petani ini. Oleh karena itu saya minta supaya pemerintah memprioritaskan membeli beras petani dulu," tegas Politisi Fraksi PKS ini. **hal/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota komisi IV DPR RI Hermanto saat diwawancarai **Parlementaria** di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

FOTO: OJ/PDT

Penataan Transportasi Laut Tunjang Kebutuhan Wisatawan di Benoa

Tim Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Komisi V melakukan pertemuan dengan para mitra, termasuk Angkasa Pura yang memaparkan rencana pengembangan masterplan 2 tahun ke depan mengenai Bandara Ngurah Rai.

Komisi V menilai ke depannya Bandara Ngurah Rai tidak lagi dapat menampung pengunjung untuk mengantisipasi kepadatan wisatawan. Karena itu, Komisi V sangat mendukung rencana dari mitra agar bandara tersebut tertata sebaik mungkin, khususnya terkait sarana dan prasarana.

"Ya tentu kemudian juga lalu lintas di sekitar Bandara Bali ini perlu ditata sebaik mungkin. Soal jalan tol, kereta api, pilihan-pilihan (moda transportasi) yang lain apakah harus dengan LRT (Light Rail Transit) atau apa ini juga harus betul-betul direncanakan secara baik. (Tentu dengan pertimbangan) pulau Bali yang luas lahannya terbatas dan jumlah orang yang sangat banyak," jelas Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kepada Parlementaria, usai pertemuan di Ruang Pertemuan Pelindo, Benoa, Denpasar, Bali, Senin (4/3).

Selain itu, Komisi V juga mengusulkan perlu juga mengembangkan sistem transportasi laut, melalui kapal-kapal feri di

beberapa dermaga yang dimiliki Dirjen Kelautan Kementerian Perhubungan. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan transportasi, wisatawan domestik maupun mancanegara, dengan standarisasi dari Kementerian Perhubungan yang mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keamanan.

"Kalau kita mungkin kembangkan seperti di Hongkong ya kapal feri yang standarnya bagus ya untuk menghubungkan antara pantai di Bali ini, tidak perlu lagi lewat darat, orang bisa menjangkaunya melalui laut tentu dengan kapal yang aman dan nyaman kalau jaraknya tempuhnya cuma sedikit," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. **mri/dn**



FOTO: MRI/PDT

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Kunker Reses Komisi V DPR RI ke Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024).



Stok BBM Jelang Ramadan dan Idul Fitri Harus Aman

Jelang bulan suci ramadan dan hari raya idul fitri, konsumsi BBM di sejumlah daerah di Indonesia diprediksi akan meningkat, salah satunya di Provinsi Bali. Untuk itu, Komisi VII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM di Bali supaya aman dalam mengantisipasi libur panjang pada hari raya idul fitri.

Hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris sampaikan usai kunjungan spesifik Komisi VII

DPR RI ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) sanggaran PT Pertamina (Persero) Bali, Kamis (7/3).

”

PERTAMINA MENGHITUNG KEMBALI DENGAN BAIK KETERSEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUSNYA PERTALITE YANG MENJADI KONSUMENNYA MASYARAKAT UMUM, BEDA DENGAN PERTAMAX KAN LEBIH TINGGI DAN UNTUK MOBIL-MOBIL TRANSPORTASI UMUM MENGGUNAKAN PERTALITE.

”Banyaknya Pertashop yang tutup di sejumlah daerah padahal Pertashop dapat membantu distribusi BBM kepada masyarakat hingga daerah tertinggal terluar dan terpencil (3T),” kata Andi Yuliani.

Politisi Fraksi PAN juga menambahkan, kondisi cuaca dan kemacetan juga harus diperhatikan karena dalam kondisi macet tentu akan dobel bahan bakar, semua harus diantisipasi dan harus dihitung dengan baik.

”Pertamina menghitung kembali dengan baik ketersediaan bahan bakar minyak khususnya pertalite yang menjadi konsumennya masyarakat umum, beda dengan pertamax kan lebih tinggi dan untuk mobil-mobil transportasi umum menggunakan pertalite,” terang Andi Yuliani.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai ketersediaan layanan energi yang diberikan Pertamina Patra Niaga sudah cukup memadai dan efektif di Bali untuk itu, ia berkomitmen untuk terus turut serta mengawal ketersediaan stok BBM baik di Bali maupun secara nasional dalam momen Ramadan dan Idul Fitri.

”Sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan Pertamina secara menyeluruh di Bali juga dengan BPH Migas berjalan dengan baik, sehingga pengawasan ketersediaan BBM-nya juga berjalan dengan baik, solar baik pun BBM yang harga ditentukan berjalan dengan baik, artinya pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas dan operasional dan sinergi yang dilakukan oleh Pertamina sudah cukup baik di Bali,” urainya. **afr/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris saat kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke terminal bahan bakar minyak (TBBM) sanggaran PT Pertamina (Persero) Bali, Kamis (7/3/2023).

FOTO: AFR/PDT

PLTS Nusa Penida Bisa Jadi Pelopor EBET Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon guna menjaga kenaikan suhu global. Salah satu upayanya menaikkan target *Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC)* menjadi 32% atau setara dengan 912 juta ton CO₂ pada tahun 2030. Demi mencapai *net zero emissions* pada tahun 2060 atau lebih awal.

Mengawali hal tersebut, PT PLN telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid Nusa Penida dengan harapan dapat membangun sebuah transisi energi yakni Energi Baru Terbarukan (EBET) khususnya di Provinsi Bali.

Pada Kunjungan Kerja kali ini, Sugeng Suparwoto yang menjadi Ketua Tim pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Denpasar, Bali, Kamis, (7/3). Mengungkapkan pendapatnya terhadap langkah PT PLN Provinsi Bali yang telah membangun PLTS Hybrid Nusa Penida dengan harap

bisa memulai sedikit demi sedikit upaya menekan emisi bahan bakar fosil yang sangat besar.

”

PLTS NUSA PENIDA MEMPUNYAI 3,5 MWAC, INI ADALAH SEBUAH LANGKAH AWAL DAN STRATEGIS BAGI TRANSISI ENERGI YANG DIWUJUDKAN DENGAN MEMBANGUN PLTS YANG BERADA DI PULAU NUSA PENIDA, DAN MEMPEROLEH PENGALAMAN EMPIRIK DIMANA MENGGANTI ENERGI FOSIL DENGAN ENERGI BARU SEHINGGA BISA DITINGKATKAN UNTUK CAKUPAN YANG LEBIH LUAS LAGI.

“PLTS Nusa Penida mempunyai 3,5 MWac, ini adalah sebuah langkah awal dan strategis bagi transisi energi yang diwujudkan dengan membangun PLTS yang berada di pulau Nusa Penida, dan memperoleh pengalaman empirik dimana mengganti energi fosil dengan energi baru sehingga bisa ditingkatkan untuk cakupan yang lebih luas lagi,” ujar Sugeng.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga mempertanyakan Kementerian ESDM yang di dukung oleh PLN mengenai rasio elektrifikasi, bahwa tingkat elektrifikasi di Indonesia sebesar 99,54% tetapi berbeda dengan data faktual yang ditemukan masih banyak desa yang belum mendapatkan sumber daya listrik, maka dari itu Komisi VII DPR RI mencoba untuk mencocokkan data kembali agar kedepannya dapat menerapkan Energi Baru Terbarukan (EBET) di seluruh Indonesia. **mf/aha**



FOTO: FHN/PDT

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto saat bertukar cenderamata usai pertemuan di Denpasar, Bali, Kamis, (7/3/2024).



Hilirisasi Timah Belum Bisa Berkembang Maksimal

Komisi VII DPR RI terus dorong hilirisasi pertambangan, termasuk timah. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan memacu ekspor. Bambang Haryadi selaku Wakil Ketua Komisi VII menilai bahwa hilirisasi ini merupakan program andalan pemerintah, namun belum berjalan maksimal dan belum bisa berkembang.

"Problemnya adalah regulisasi fiskal yang sekaligus tidak mendukung hilirisasi itu sendiri. Yang kita ketahui, barang-barang setengah jadi seperti *Nickel Ingot*, *Nickel Pig Iron* (NPI), masih dipungut Ppn 11%. Hal ini justru lebih mahal ketimbang mendapatkan produk dari luar negeri. Jadi menurut saya, mungkin saja orang pajak bilang 'itukan bisa restitusi?' tapi bagi saya hal itu tidak menarik. Solusinya ya Ppn 11% yang dihapus saja," ungkap Bambang saat ditemui sesuai Kunjungan Komisi VII DPR RI di Bali, Kamis (7/3).

Lebih lanjut, Bambang Patijaya selaku Anggota Komisi VII DPR RI juga menjelaskan bahwa ditengah persoalan manajerial dan internal yang menimpa PT Timah Tbk saat ini. Ia berharap adanya titik keseimbangan baru, sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali normal dan juga tumbuh.

"Kami (Komisi VII DPR RI) berpesan bahwa persoalan yang sedang terjadi tidak berimplikasi terhadap kontribusi dan persoalan ekonomi masyarakat, seperti yang terjadi di Bangka Belitung. Kita lihat sejak proses penegakan hukum ini berjalan, justru ekonomi Bangka

Belitung anjlok. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya ekspor timah pada 2 bulan terakhir ini," tegasnya.

”

DAERAH PENGHASIL TIMAH TERBESAR DI INDONESIA INI TERANCAM KOLAPS. MELIHAT PEMERINTAH TERUS MEMBERIKAN KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR TIMAH. PASALNYA, TIMAH SUDAH MENJADI TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN DI SANA.

Bambang kemudian menambahkan bahwa daerah penghasil timah terbesar di Indonesia ini terancam kolaps. Melihat pemerintah terus memberikan kebijakan larangan ekspor timah. Pasalnya, timah sudah menjadi tulang punggung perekonomian di sana.

"Sejauh ini Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan hilirisasi timah menjadi tin ingot atau timah batangan. Makanya, jika larangan ekspor timah memang diberlakukan, maka hal tersebut sangatlah tidak tepat," tutupnya. dip/aha



FOTO: DIP/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi saat memimpin Kunjungan Komisi VII DPR RI di Bali, Kamis (7/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Sambut Baik Wacana Kepesertaan BPJS Kesehatan Syarat Wajib SKCK

Pemerintah telah memulai uji coba penerapan penggunaan kepesertaan BPJS Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada 1 Maret 2024. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Emanuel Melkiades Laka


”

**KARENA PRINSIP
DASAR BPJS
KESEHATAN INI
ADALAH GOTONG
ROYONG, JADI
SEMAKIN BANYAK
ORANG IKUT ITU
(MAKA) SEMAKIN
BAIK BAGI
KEPESERTAAN
DAN JUGA DARI
PELAYANAN BPJS
KESEHATAN**

Lena menyambut baik wacana tersebut lantaran akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan menjadi peserta aktif BPJS.

“Saya pikir wacana ini bagus, sehingga nanti semakin banyak masyarakat Indonesia menjadi peserta dan bisa menikmati layanan BPJS kesehatan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Melki, sapaan akrabnya saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/3).

Penerapan aturan ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN dan sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK. Diharapkan dengan peraturan tersebut makin banyak masyarakat yang ikut terlibat mendukung JKN sekaligus merasakan manfaatnya.

“Presiden Jokowi sudah mengeluarkan instruksi presiden dalam rangka untuk memperluas cakupan kepesertaan dan juga pelayanan dari BPJS Kesehatan sehingga bisa mencakup banyak masyarakat Indonesia dalam BPJS Kesehatan. Karena prinsip dasar BPJS Kesehatan ini adalah gotong royong, jadi semakin banyak orang ikut itu (maka) semakin baik bagi kepesertaan dan juga dari pelayanan BPJS Kesehatan” kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu. 



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/3/2023).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Prihatin Maraknya Tenaga Kerja Anak di Bintan Kepri

Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengungkapkan keprihatinan atas maraknya pemanfaatan tenaga kerja anak (*child labour*) di Kabupaten Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Ia menyoroti serius masalah ini, di mana sejak usia 15 tahun para anak tersebut sudah banyak dipekerjakan di berbagai bidang.

"Terutama kalau dilihat dari segi tenaga kerja. Tenaga kerja anak usia 15 tahun, itu masuk ke dalam usia tenaga kerja. Nah, padahal 15 tahun itu kalau dilihat masih SMP," ujar Itet Tridjajati Sumarijanto usai mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/2).

Lebih lanjut, kata Itet,

menegaskan bahwa pada usia tersebut, seharusnya anak-anak masih berada di bangku sekolah dan membutuhkan bimbingan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini dilihat dari kurangnya keterbukaan dalam penyediaan data terkait jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak usia tersebut.

Legislator Dapil Lampung itu menilai bahwa Pulau Bintan yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa seharusnya mampu memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dia menyebut pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas bagi anak-anak di daerah tersebut.

Politisi Fraksi Partai

PDI-Perjuangan mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya partisipasi dalam bidang pendidikan di Pulau Bintan. Ia mengatakan rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah karena alasan jarak dan kurangnya keterampilan berpikir inovatif.

Kendati demikian, Itet menyoroti pentingnya pemilihan umum yang berlangsung dengan jujur dan adil, namun dirinya mengekspresikan ketidakpercayaannya terhadap partisipasi politik dari mereka yang kurang teredukasi. Dengan demikian, dia berharap perlu adanya tindakan konkret untuk memastikan pendidikan dan perlindungan anak di wilayah tersebut. **aas/rdn**



FOTO: AAS/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto saat mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/02/2024).

Magang di Rumah Rakyat, Peluang Mahasiswa Tingkatkan *Soft Skill*

Program 'Magang di Rumah Rakyat' DPR RI Batch ke-4, bagian dari Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Tahun 2024, kembali digelar. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meresmikan acaranya di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3). Tercatat dari 23.000 pendaftar se-Indonesia, 350 mahasiswa berhasil lolos seleksi.

Dalam pidatonya, Dede Yusuf mengungkapkan konsep dasar utama dari magang adalah bagaimana segenap mahasiswa-mahasiswi belajar masuk di dalam dunia nyata atau real life, khususnya dalam hal ini dunia kerja. Oleh karena itu,

Dede Yusuf berpesan agar peserta magang menimba ilmu semaksimal mungkin dalam meningkatkan *soft skill* diantaranya kerja tim, komunikasi, respek, inisiatif, kolaborasi dan akses.

"Bekerja sama lebih penting daripada bekerja sendiri, bagaimana kemampuan berkomunikasi, karena tanpa berkomunikasi tentu kita akan sulit bekerja. Bagaimana belajar respek menghargai teman mitra kerja termasuk atasan atau termasuk yang dibawah kita, bagaimana menghargai *office boy*. Hal-hal seperti ini tidak ditemukan di kampus. Di dalam dunia kerja kita akan melihat bagaimana komunikasi adalah salah satu faktor yang penting," ujar Dede Yusuf.

Selain komunikasi, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut

menerangkan hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah inisiatif. Diungkapkannya, siapa yang lebih berinisiatif maka akan membuka pintu akses untuk mendapatkan kepercayaan lebih. Itulah sebabnya, tandas Dede Yusuf, inisiatif menjadi aspek penting untuk kita menunjukkan kemampuan dan potensi diri.

"Banyak diantara kemarin mahasiswa-mahasiswa magang yang kemudian ditunjuk untuk menjadi pimpinan pimpinan daripada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada. Banyak juga yang ditunjuk juga untuk menjadi tim sukses dari para anggota di dapilnya masing-masing, banyak sekali peluang peluang itu, inisiatif menjadi salah satu kunci utama," tandasnya. — pun/aha



FOTO: JKA/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat membuka acara Program 'Magang di Rumah Rakyat' DPR RI Batch ke-4, di Ruang Pustakaloka, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Tes PPPK Guru Terbuka Bagi yang Memenuhi Syarat

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (Mendikbud) Nadiem Makarim agar kembali menegaskan bahwa seleksi tes bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru terbuka untuk umum bagi mereka yang memenuhi syarat. Pernyataan tersebut diungkapkannya saat Raker Komisi X dengan Mendikbud beserta jajarannya, di ruang rapat Komisi X, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

”

SOAL GURU SWASTA YANG MENGIKUTI TES PPPK, BANYAK INFORMASI DI DAERAH YANG MEREKA PEROLEH, ADA DISKRIMINASI BAHWA SEOLAH-OLAH GURU SWASTA ITU TIDAK DIPERBOLEHKAN TES PPPK.

“Soal guru swasta yang mengikuti tes PPPK, banyak informasi di daerah yang mereka peroleh, ada diskriminasi bahwa seolah-olah guru swasta itu tidak diperbolehkan tes PPPK. Informasi masih cukup kencang di bawah, sehingga kita perlu menegaskan kembali bahwa ini terbuka untuk semua mereka yang memenuhi persyaratan baik dari swasta maupun negeri,” papar Andreas.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga meminta agar ada regulasi supaya guru swasta yang lolos PPPK ini tetap bisa ditempatkan di sekolah swasta, sehingga tidak terjadi kekosongan atau kekurangan guru di sekolah swasta. Karena itu akan menimbulkan masalah baru buat sekolah-sekolah swasta.

“Kemudian hal yang berkaitan dengan guru swasta yang lolos PPPK dan kemudian menjadi ASN. Sekolah-sekolah swasta komplain soal ini. Saya bicara dengan bupatinya supaya mereka membuat MoU dan penugasan kembali ke sekolah swastanya, bupati punya otonomi untuk SMP dan SD. Mohon kejelasan apa solusi dari kita?” ungkap Andreas.

Tes umum PPPK guru untuk pelamar itu tertuang dalam Permen PANRB No 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru pada instansi daerah. Seleksi pelamar umum dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi PPPK Guru yang disisakan oleh pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Pada Pasal 37 Permen PANRB No 20 Tahun 2022, memuat kebutuhan PPPK Guru 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. **ssb/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat mengikuti Raker Komisi X dengan Mendikbud beserta jajarannya, di ruang rapat Komisi X, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

FOTO: DEP/PTD

Sosialisasi Peranan LPS Harus Terstruktur dan Masif

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menyatakan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus dapat melakukan sosialisasi literasi secara lebih aktif dari yang selama ini dilakukan. Hal itu mengingat, tidak hanya masyarakat umum, namun di kalangan masyarakat terdidik masih banyak yang belum mendapatkan informasi utuh soal penjaminan itu sendiri.

"Kita dorong LPS untuk bisa melakukan sosialisasi literasi lebih banyak dari yang sekarang-sekarang. Karena (ada) pemahaman terhadap penjaminan itu sendiri menjadi perdebatan. Misalnya,

persoalan kalau punya rekening saldonya (yang dijamin) lebih dari 20 miliar. Ada yang mengatakan yang 2 miliarnya yang dijamin, ada yang mengatakan, oh tidak 100 persennya tidak dijamin. Nah itu jadi persoalan," katanya kepada **Parlementaria** di Batam, Kepri, Sabtu (2/3).

Menurut Marinus Gea, hal ini terjadi karena lemahnya sosialisasi literasi peran LPS, terutama pemaknaan kalimat dari peraturan dan UU yang sudah tersedia, sehingga Komisi XI DPR RI mendorong LPS untuk bisa melakukan sosialisasi lebih intens.

"Baik (sosialisasi dilakukan) secara publik kepada masyarakat

dengan berbagai media-media yang bisa dilakukan. Sehingga, peran LPS ini terhadap simpanan-simpanan nasabah dapat dipahami lebih baik," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Senada dengan Marinus Gea, Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah pun mengakui bahwa literasi soal pemahaman peran LPS sangatlah penting. Hal itu mengingat masyarakat Indonesia jauh tertinggal soal pemahaman itu. Padahal, di sisi lain keterlibatan masyarakat di sektor keuangan sangat tinggi, karena sebagian masyarakat terlibat dalam sektor tersebut melalui program BLT dan PKH atau sejenisnya.

ndy/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea dan Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah dalam foto bersama usai pertemuan di Batam, Kepri, Sabtu (2/3/2024).

Komitmen Selesaikan Perjanjian Ekonomi IEU-CEPA

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan Parlemen Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral dengan Uni Eropa khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang lebih besar melalui *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA).

"Kita ingin segera IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa ini bisa segera diselesaikan karena ini bisa membuka potensi ekonomi, potensi perdagangan yang lebih

besar antara kita dengan Uni Eropa," terang Fadli usai menerima *courtesy call* Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan Direktur Kerja Sama Parlemen Eropa dengan ASEAN Antoine Ripoll di Ruang Delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3).

Lebih lanjut, meski Parlemen Eropa akan menggelar Pemilihan Umum pada bulan Juni 2024 mendatang, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut mengharapkan hal itu tidak menjadi faktor tertundanya penyelesaian kerjasama IEU-CEPA. Mengingat, tutur Fadli, melalui IEU CEPA akan

menghadirkan platform yang cukup kuat dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan Eropa.

Selain itu, Fadli mengungkapkan Parlemen Uni Eropa siap untuk bekerjasama dengan Pemerintahan Indonesia yang akan datang. "Mereka juga ingin bertemu dengan *Presiden-Elect*. Sehingga mereka juga ingin tahu kedepan kira-kira seperti apa postur antara Indonesia dengan Eropa, jadi itu harapan mereka dan tentu nanti akan saya sampaikan setelah resmi (pengumuman hasil Pilpres 2024) setelah tanggal 20 Maret," tuturnya.

— pun/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat menerima *courtesy call* Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan Direktur Kerja Sama Parlemen Eropa dengan ASEAN Antoine Ripoll di Ruang Delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

FOTO: GER/PDI

Setjen DPR Raih Prestasi di Ajang ‘Public Relation Award’ 2024

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI berhasil meraih penghargaan untuk kategori program kehumasan pemerintahan terbaik dalam ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2024. Penghargaan ini disampaikan secara langsung oleh Pendiri PR Indonesia Group Asmono Wikan kepada Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini.

Suprihartini mewakili Setjen DPR RI menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil nyata dari kerja keras semua pihak di lingkungan Setjen DPR termasuk Biro Humas dan Protokol yang berkontribusi mewujudkan Parlemen Modern. Baginya, prestasi ini juga harus bisa menjadi semangat pendorong agar Setjen DPR konsisten meningkatkan

kualitas pelayanan publik terutama pada bidang edukasi publik.

”

KAMI BERHARAP PENGHARGAAN INI MENJADIKAN SATU MOTIVASI UNTUK BIRO PROTOKOL DAN HUMAS, KHUSUSNYA DI BAGIAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN DUKUNGAN PELAYANAN KEPADA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI, KHUSUSNYA DALAM EDUKASI PARLEMEN.

“Kami berharap penghargaan ini menjadikan satu motivasi untuk Biro Protokol dan Humas, khususnya di Bagian Humas dalam meningkatkan dukungan pelayanan kepada sekretariat jenderal DPR RI, khususnya dalam edukasi parlemen,” ungkap Suprihartini usai menghadiri penyerahan penghargaan PRIA 2024 di Kota Denpasar, Bali, Kamis (7/3).

Menutup pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran petinggi Setjen DPR RI yang telah memberikan dukungan sekaligus arahan demi kesuksesan program edukasi parlemen. Melalui program ini, menurutnya, publik bisa lebih dekat untuk mengenal dan memahami kerja DPR dengan lebih baik. — ts/aha



FOTO: DOK/PDT

Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini, mewakili Setjen DPR RI saat menerima penghargaan PRIA 2024 di Kota Denpasar, Bali, Kamis (7/3/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Siap Jadi Referensi Indonesia dalam Pemberitaan Keparlemenan

Televisi dan Radio (TVR) Parlemen mengadakan Lokakarya dengan tajuk "Membangun Sinergi Dengan Televisi dan Radio Lokal Dalam Meningkatkan Pemahaman Publik Terhadap Kinerja DPR RI". Pada kesempatan ini Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, berharap TVR dapat menjadi referensi Indonesia dalam berita keparlemenan.

"Media lokal tidak harus datang

ke Jakarta, cukup ambil *source*. Sepanjang ini dicantumkan *sources*-nya dari TVR Parlemen, media sosial

DPR RI, dari media online DPR, dan lainnya. Nah itu yang dimaksud kita ingin menjadi referensi Indonesia.

”

UNTUK DI BIDANG KESETARAAN GENDER, PEMERINTAH KANADA MEMPUNYAI PROGRAM KONKRET UNTUK MENINGKATKAN SKIL BUAT WANITA-WANITA KHUSUSNYA YANG BERADA DI TARAF EKONOMI MENENGAH KE BAWAH.

Lebih luas lagi nanti spektrumnya, berita politik mengenai keparlemenan bisa mengambil *sources*-nya dari kami," jelas Indra Pahlevi usai membuka kegiatan lokakarya di Samarinda, Kamis, (7/3).

Indra Pahlevi juga menyampaikan bahwa kegiatan lokakarya kali ini diharapkan mampu menjadi sarana sosialisasi mengenai media internal DPR RI kepada insan media di daerah. Diharapkan media-media daerah dapat mengakses dan menjadikan media internal DPR RI sebagai sumber utama dalam berita keparlemenan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Ali Yamin Ishak menyetujui dan mendukung kegiatan lokakarya ini. Menurutnya informasi dari parlemen ke daerah itu sangat penting. Sehingga masyarakat Kalimantan Timur bisa mendapatkan informasi yang baik mengenai kinerja legislator di Senayan. [stu/aha](https://www.stu/aha)

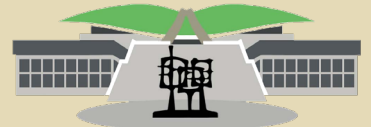


Scan QR untuk berita selengkapnya



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, saat diwawancarai usai membuka kegiatan lokakarya di Samarinda, Kamis, (7/3/2024).

FOTO: EST/PDT



**Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV
DPR RI yang dipimpin oleh Budhy Setiawan
meninjau harga dan stok bahan pangan di
Pasar Induk Cikopo, Purwakarta,
Jawa Barat. FOTO: YSN/PDT**

